

## ***Product Base Budget System (PBBS) dan Implikasinya Terhadap Desa Wisata Berbasis Blue Ekonomi***

### ***Product Base Budget System (PBBS) and Its Implications for Village Tourism Based on Blue Economy***

**Soraya Lestari<sup>1</sup>, Cut Dian<sup>2</sup>, Salwa Hayati Hasan<sup>3</sup>, Murnia Suri<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan

Email Corespondensi: soraya.lestari@uui.ac.id<sup>1)</sup>, cutdian.c5@gmail.com<sup>2)</sup>,  
salwa@uui.ac.id<sup>3)</sup>, murnia@uui.ac.id<sup>4)</sup>

#### **Abstrak**

Anggaran merupakan instrumen keuangan utama dalam mendukung program-program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Anggaran Dana Desa merupakan stimulus anggaran yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, dengan asumsi percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Karena pentingnya anggaran, maka perlu adanya strategi anggaran yang jelas untuk dapat merealisasikan tujuan pemerintah. Strategi anggaran yang digunakan adalah *Product Base Budget System (PBBS)* dimana fokus pemerintah dalam mengembangkan desa wisata harus didukung pendung dalam program anggaran desa berbasis produk. Desa yang terletak di pesisir pantai harus mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh desanya untuk dapat dikembangkan. Kepala desa harus menuangkan hal tersebut dalam bentuk strategi anggaran. Banyak potensi desa yang dapat dikembangkan seperti blue ekonomi. Dimana pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dapat digunakan untuk menjadi UMKM Desa. Namun diperlukan dukungan anggaran desa untuk merealisasikannya. Desa wisata merupakan wadah baru bagi desa untuk dapat mengeksplor keunikan desa kepada pihak eksternal. Hal ini tentunya menjadi motivasi bagi setiap desa untuk menunjukkan karakteristik desa. Setiap desa tentunya mempunyai keunikan tersendiri begitupula dengan Aceh, banyak desa yang letaknya di pesisir pantai dan berpotensi dalam pengembangan blue ekonomi. Masalah yang terjadi selama ini adalah kemalasan anggaran. Artinya anggaran yang terealisasi manfaatnya belum maksimal, dan rencana anggaran yang dibuat masih sangat monoton disetiap tahunnya. Masalah selanjutnya yang terjadi adalah tidak ada strategi anggaran desa yang jelas dalam mendukung program pemerintah seperti desa wisata, baik dalam bentuk UMKM desa maupun pemanfaatan blue ekonomi. Prioritas dana desa digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

**Keywords:** Strategi Anggaran, Dana Desa, Desa Wisata, Blue Ekonomi

#### **Abstrak**

*The budget is the main financial instrument in supporting government programs to reduce poverty. The Village Fund is a stimulus budget provided by the government to increase the economic growth of rural communities, with the assumption of accelerating economic growth in rural areas. Due to the weakness of the budget, it is necessary to have a clear budget strategy to be able to realize the government's goals. The budget strategy used is the Product Base Budget System (PBBS) in which the government's focus on developing tourism villages must be supported by a product-based village budget program. Villages located on the coast must*

*know the strengths and weaknesses of their village to be developed. The village head must draw this in the form of a budget strategy. There are many village potentials can be developed such as the blue economy. Where the utilization of marine natural resources can be used to become Micro, small, and medium enterprises Villages. However, village support is needed to make it happen. Tourism villages are a new forum for villages to be able to explore the uniqueness of the village to external parties. This is certainly a motivation for each village to show village characteristics. Each village has its uniqueness and so does Aceh, many villages are located on the coast and have the potential to develop a blue economy. The problem that has occurred so far is budget laziness. This means that the realized benefits of the budget are not maximized, and the budget plans that are made are still very monotonous every year. The next problem that occurs is the absence of a clear village budget strategy to support government programs such as tourism villages, both in the form of MSME villages and the utilization of the blue economy. Village funds are prioritized for village development and village community empowerment.*

**Keywords:** Budget Strategy, Village Fund, Tourism Village, Blue Economy

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah ekonomi yang tidak ada habisnya, Kemiskinan selalu diidentikkan dengan inflasi, pengangguran dan buruknya sumberdaya manusia. UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi harapan pembangunan negeri dari pedesaan. Harapan ini seharusnya dapat menjadi motivasi dari inovasi percepatan pemerataan pembangunan ekonomi. Adanya anggaran yang diberikan untuk setiap desa melatih desa secara mandiri untuk meningkatkan potensi yang dimiliki. Permasalahan yang utama dalam penelitian ini adalah masih banyak desa yang belum mengeksplor potensi desa sehingga belum menjadi destinasi desa wisata. Urgensi penelitian ini sangat penting, dimana dengan hasil penelitian yang dilakukan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa untuk membuat strategi yang baik dalam penganggaran dan mendukung desa wisata terutama blue ekonomi. Tujuan Khusus adalah untuk meningkatkan kualitas anggaran desa agar mendapatkan output anggaran yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan strategi anggaran desa wisata.

Anggaran dana desa harus digunakan sesuai dengan peraturan dan prioritas pembangunan ekonomi, untuk itu diperlukan rencana strategis yang baik agar anggaran dapat tepat sasaran. Realisasi anggaran yang tepat sasaran akan membangun desa secara berkelanjutan. Namun sayangnya, masih banyak desa yang belum merencanakan anggarannya dengan baik sehingga dana desa belum dapat menjadikan masyarakat dipedesaan menjadi mandiri. Dana desa diberikan agar desa dapat mengelola anggaran desanya secara mandiri dan menciptakan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dana Desa merupakan secercah harapan bagi desa, dimana desa seharusnya lebih mengenal karakter daerahnya sehingga mengetahui potensi apa yang dapat dikembangkan. Namun sayangnya, sumberdaya manusia yang tidak kompeten dalam mengelola anggaran menjadikan Dana Desa kerap diselewengkan dan tidak tepat sasaran. Pada Gambar 1 dapat

dilihat persentase kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan di Provinsi Aceh masih sangat timpang.

**Tabel 1. Persentasi Wilayah Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan di Aceh**

<b>Persentase Penduduk Miskin menurut Wilayah Perkotaan Pedesaan Provinsi Aceh Tahun 20011-2019</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Wilayah Penduduk Miskin (%)</b>		
	<b>Perkotaan</b>	<b>Perdesaan</b>	<b>Total</b>
2011	13,69	21,87	19,57
2012	13,07	21,97	19,46
2013	11,59	19,96	17,60
2014	11,76	20,52	18,05
2015	11,13	19,44	17,08
2016	10,82	19,11	16,73
2017	11,11	19,37	16,89
2018	10,44	18,49	15,97
2019	9,68	18,03	15,32

Sumber : BPS Provinsi Aceh  
 Ket : Periode Maret

Data terakhir sebelum Covid-19 dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2019 persentase kemiskinan di perkotaan menurun hingga menjadi 9,68% di tahun 2019 sedangkan dipedesaan sebesar 18,03% namun masih sangat besar gap kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan. Gap ini diharapkan dapat diminimalisir dengan penggunaan strategi anggaran yang baik. penggunaan dana desa yang diprioritaskan kepada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berfokus pada desa wisata. Sehingga segala aspek pembangunan yang dilakukan dapat menghasilkan outcome yang baik. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia berupa skill dan pengetahuan yang mempunyai terhadap aspek produktif desa. Masyarakat pesisir yang inovatif dapat mengolah hasil kekayaan alam perairan desa menjadi hasil produksi UMKM yang bernilai dan berstandar nasional. Hal ini tentunya menjadi nilai jual desa tersebut dan dapat menjadi objek wisata baik lokal maupun internasional.

## KAJIAN LITERATUR

### Product Base Budget System (PBBS)

Kemiskinan bisa disebabkan oleh banyak faktor, namun secara garis besar faktor yang menyebabkan kemiskinan dikelompokkan menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah sehingga berdampak pada rendahnya upah dan pendapatan, kelemahan fisik, sikap atau perilaku. Sedangkan faktor eksternal dapat berupa buruknya sarana dan prasaranan transportasi sehingga menyulitkan masyarakat melakukan aktivitas ekonomi, akses yang rendah terhadap modal dan sumber daya alam, penggunaan teknologi yang masih terbatas, dan sistem kelembagaan yang belum sesuai dengan kondisi masyarakat (Susilowati, 2010). Program kemiskinan yang selama ini dilakukan baik bersumber dari pemerintah

maupun swasta umumnya hanya sementara. Dimana program tersebut berjalan hanya sesuai dengan porsi anggaran, bukan dengan pendekatan proyek. Sehingga tidak heran bahwa pada akhirnya angka kemiskinan secara absolut di Indonesia tetap tinggi (Nurwati, 2008) . Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021 Aceh masih menjadi provinsi termiskin di Sumatera dengan jumlah penduduk termiskin 15,33%. Hal ini sangat disayangkan mengingat Aceh merupakan daerah otonomi khusus dan adanya anggaran desa yang harusnya dapat meningkatkan kemandirian masyarakat.

Pemberian alokasi dana desa merupakan bentuk pemenuhan hak desa atas pelaksanaan otonomi sendiri untuk tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri pada keanekaragaman, partisipasi, otonomi, pemberdayaan, demokratisasi masyarakat dan peningkatan peran desa pemerintah dalam memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta percepatan perkembangan dan pertumbuhan wilayah-wilayah yang ditinggikan. Melalui alokasi dana desa, desa memiliki kesempatan untuk mengelola pembangunan, pemerintahan, dan pembangunan sosial desa secara mandiri (Asni dkk, 2013). Dalam pelaksanaan anggaran kegiatan di pedesaan harus sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 22 yaitu penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tigapuluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk antara lain:

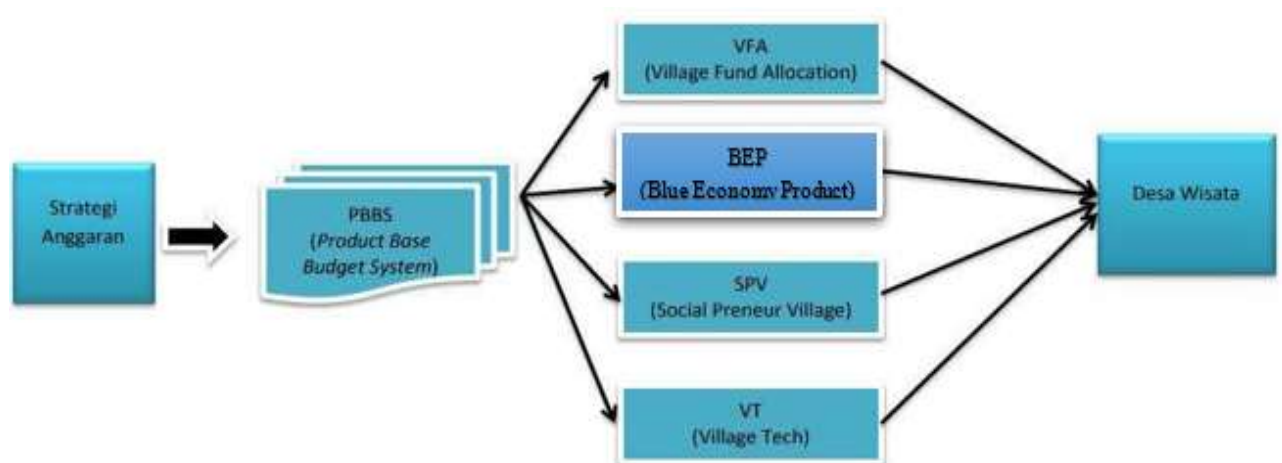
- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
- e. Teknologi Tepat Guna.
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
- g. Pengembangan sosial budaya.
- h. Dan sebagainya yang dianggap penting.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mursyidin dkk, dengan judul “The Effectiveness Of Village Budget Used For Village’s Development” memperoleh hasil pembangunan Gampong Tanoh Darat sudah efektif, hal ini dilihat dari program-program yang telah dilaksanakan oleh Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPG) dengan indikator pengukuran: 1) kejelasan tujuan yang ingin dicapai; 2) kejelasan strategi pencapaian tujuan; 3) proses menganalisis dan merumuskan kebijakan yang sehat (Mursyidin, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Warsono & Ruksamin dengan judul “The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi” memperoleh hasil besarnya kompleksitas masalah, lemahnya aturan hukum yang mengakomodir kepentingan desa. Dengan indikator model penelitian: 1) proses usulan penyerapan dan kegiatan program ADD sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2) pelaksanaan program ADD sesuai dengan rencana yang berlaku tetapi pembuatan APBD diserahkan ke BPMD Kabupaten Konawe Utara; 3) implementasi program ADD mulai dari usulan rencana hingga pembuatan anggaranang diserahkan ke BPMD Kabupaten Konawe Utara (Warsono & Ruksamin, 2014).

Penelitian yang dilakukan Handayani dan Badrudin dengan judul “Evaluation of Village Fund Allocation on Indonesia” memperoleh hasil perlunya evaluasi VFA agar alokasi dana desa dapat berjalan efektif. Evaluasi VFA bisa di berupa sosialisasi peraturan pemerintah yang maksimal, SDM yang memadai kapasitas, dan penyaluran dana, serta penggunaan dana yang tepat. Sehingga bisa mengurangi penggunaan dana di luar prioritas dan potensi penyelewengan VFA. Implementasi VFA yang efektif akan mendukung pembangunan desa sehingga kesejahteraan akan meningkat. Dengan indicator model penelitian: 1) Village Fund Allocation (VFA) ; 2) Capital Expenditure (CE); 3) Economic Growth (EG); 4) Poverty (PVT) (Handayani & Badrudin, 2019).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana strategi anggaran menggunakan *Product Base Budget System* (PBBS), PBBS akan membantu desa dalam penganggaran yang efisien dan efektif untuk mencapai desa wisata mandiri secara berkelanjutan dengan memanfaatkan hasil alam kelautan pada daerah pesisir pantai untuk mendukung blue ekonomi. Indikator penelitian:

1. Alokasi anggaran dana desa sesuai dengan Permendagri No.37 Tahun 2007 Pasal 22;
2. Adanya produk khas desa berbasis blue ekonomi;
3. Adanya pengembangan wirausaha sosial desa;
4. Pengembangan teknologi desa.



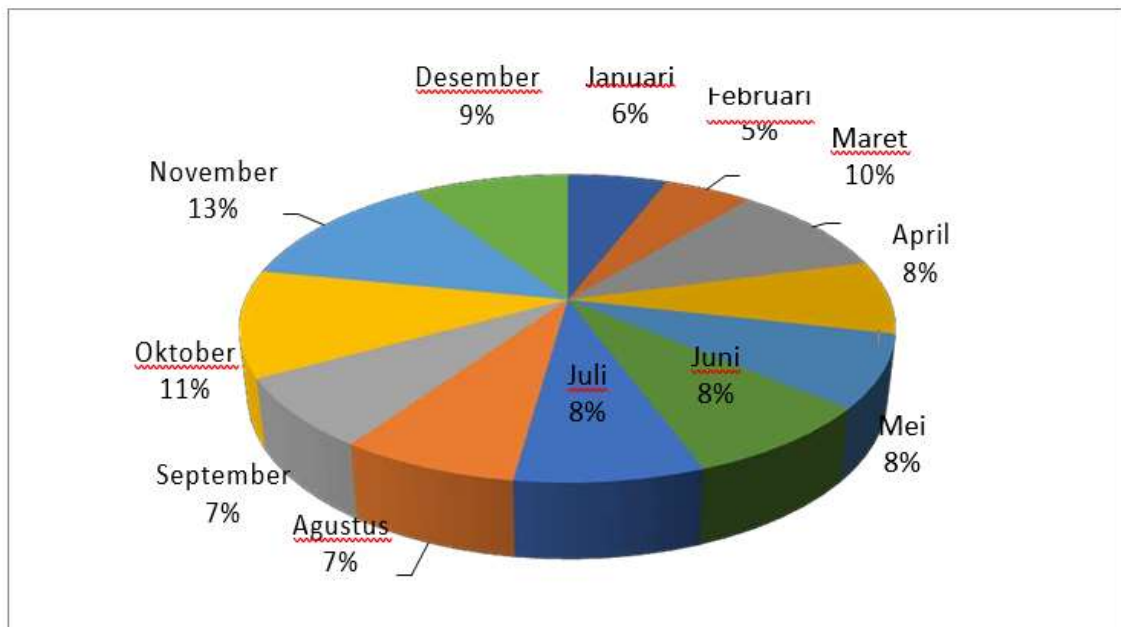
**Gambar 1 Strategi Anggaran PBBS**

## Desa Wisata

Peningkatan teknologi tepat guna dalam mengolah sumber daya desa dengan konsep blue ekonomi dapat mendukung terrealisasinya desa wisata, sehingga meningkatkan jumlah wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk berkunjung. Namun sayangnya, pariwisata di Aceh masih sangat minim. Pariwisata berkelanjutan menekankan pada pentingnya peran para pemangku kepentingan dalam pembangunan berkelanjutan suatu daerah tujuan (Astawa dkk, 2017). Permasalahan yang terjadi antara potensi sumber daya alam dengan sumber daya

manusia adalah masyarakat tidak mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada untuk memanfaatkan sebagai potensi wisata (Purnomo dkk, 2020). Pengembangan desa wisata berkelanjutan menekankan pada empat prinsip (Suprihardjo, 2014) yaitu:

1. Layak secara ekonomi;
2. Lingkungan bias dilakukan;
3. Dapat diterima secara sosial;
4. Secara teknologi sesuai.



Sumber: bps (2022)

**Gambar 2. Persentase Tingkat Pariwisata dari Penghunian Kamar Tahun 2021**

Persentase pariwisata jika dilihat dari hunian kamar di tahun 2021 sangat berfluktuatif, sehingga perlu dilakukan strategi khusus untuk dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berwisata dan desa untuk dapat menjadi desa wisata dengan karakteristik yang unik. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis data pada maret 2012, jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 29,13 Juta jiwa, atau 11,96 % dari total penduduk Indonesia. Dari data tersebut sekitar 65% nya merupakan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Di sisi lain pada bidang ekologi, Indonesia tercatat sebagai negara dengan proses pembangunan perikanan dan kelautan yang kurang dari pada negara yang lain (Hakim, 2013). Desa wisata dengan konsep blue ekonomi merupakan hal yang menarik untuk dikembangkan di daerah pesisir pantai. Kelebihan konsep blue ekonomi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia (Ghalidza, 2020):

1. Mengedepankan produksi kelautan
2. Menjadi sektor penyumbang pendapatan nasional
3. Komoditas ekspor dan peningkatan devisa

4. Potensi kelautan hayati dan non hayati juga memiliki kontribusi yang tinggi dalam pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi
5. Blue ekonomi menjadi andalan ekonomi berkelanjutan karena bersifat ramah lingkungan dan mengedepankan keberlangsungan ekosistem

### **Blue Ekonomi**

Blue economy erat kaitannya dengan konsep minapolitan yaitu konsep inter firm linkage untuk mendorong pertumbuhan sektor perikanan dan kelautan nasional agar kompetitif di pasar global. Fakta bahwa Indonesia memiliki laut yang luas membuat Indonesia juag kaya akan potensi sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan tersebut tidak hanya yang terdapat di lautan tetapi juga perikanan budidaya laut dan budidaya darat (Ghalidza, 2020). Sangat disayangkan pengelolaan potensi kelautan di daerah-daerah kepulauan nampaknya belum didukung inovasi yang dipadupadankan dengan kearifan lokal yang didorong oleh partisipasi masyarakat. Ketiga hal tersebut menjadi instrumen transformasi yang komprehensif, ketikapara pemangku kepentingan berupaya melakukan perbaikan terhadap sistem regulasi/kebijakan, pengembangan kapasitas kelembagaan, pembenahan tata kelola, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu menjamin kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Maknanya, setiap inovasi yang ditumbuhkan harus mengadopsi nilai-nilai budaya lokal sebagai suatu kearifan bersama setempat yang dimiliki dan diwarisi secara turun-temurun (Saksono, 2013). Aspek kebijakan perubahan iklim untuk Carbon Budget Tangging (CBT), (Pimpalkhute, 2021):

- Memperkuat kerangka pemantauan untuk:
  1. Informasi anggaran dan pengeluaran dapat melengkapi output dan outcome performance informasi untuk memberikan banyak gambaran dari perkembangan kebijakan perubahan iklim dan target keuangan.
  2. Jika kebijakan dan program dikenai biaya, kesenjangan pendanaan dapat diperkirakan, kesenjangan pendanaan dapat diperkirakan.
- Informasi Perencanaan dan Prioritas Pemerintah
  1. Informasi pengeluaran dapat melengkapi informasi output/outcome sebagai basis untuk menilai pelaksanaan program (ekonomi, efisiensi, dan efektifitas)
  2. Informasi anggaran bisa sebagai suatu indikasi apakah prioritas kebijakan iklim tercermin dalam komitmen keuangan negara.
- Meningkatkan kesadaran dalam pemerintahan dan diantara masyarakat tentang skala pengeluaran public untuk perubahan iklim.
  1. Proses identifikasi belanja beban pengeluaran untuk iklim di setiap sektor Kementerian/peningkatan kapasitas CBT dan membantu meningkatkan visibilitas tujuan kebijakan perubahan iklim di seluruh pemerintah dan memobilisasi tindakan lebih lanjut.
  2. Mengkomunikasikan kepada publik tentang skala anggaran pemerintah untuk anggaran perubahan iklim dapat meningkatkan profil dari issue dan mendukung mobilisasi untuk aksi perubahan iklim.

Indonesia menyampaikan usulan prinsip Ekonomi Biru dalam Forum Rio+20. Artinya, Pemerintah dan para pemangku kepentingan telah membangun kesadaran bersama untuk mengawali pembangunan daerah dengan mengutamakan potensi kelautan terutama bagi daerah berkarakter kepulauan dan wilayah pesisir. Bila hal ini dilakukan, secara sekuen akan terjadi pengaruh dan perubahan fundamental terhadap kesadaran global dalam pengelolaan laut dan sumber daya pesisir secara berkelanjutan selaras dengan harapan Forum Rio+20 (Saksono, 2013). Memadukan referensi berbagai literatur, ekonomi biru sangat bermanfaat untuk:

1. Optimalisasi potensi sebagai akibat dari kondisi geografis Indonesia - Negara Kepulauan (archipelagic state);
2. Mempertahankan kondisi laut, potensi sumber daya pesisir, dan penciptaan energi terbarukan;
3. Keberimbangan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan laut dalam menjaga kelestarian ekosistem laut;
4. Memperbanyak sumber pangan yang dapat diandalkan dan memastikan keberlangsungan ketahanan pangan masyarakat (terutama yang berasal dari laut untuk mereka yang bermukim di pesisir);
5. Menjamin perlindungan lingkungan dan kelestarian sumber daya alam, khususnya sektor kelautan dan perikanan;
6. Mempercepat pencapaian pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan;
7. Penciptaan lapangan kerja baru dengan andalan mengoptimalkan jasa lingkungan dan nilai ekonomi (khususnya lautan) yang dapat meningkatkan pendapatan;
8. Penguatan manajemen sumber daya laut lepas olahan melalui pendekatan ekosistem pengelolaan perikanan laut;
9. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, supervisi, dan advokasi kelestarian lingkungan laut;
10. Perlindungan terhadap spesies langka;
11. Meningkatkan kesiapan, kesiapan, dan daya tahan masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim dan bencana alam;
12. Mereduksi dampak pemanasan global, perubahan iklim, dan kenaikan permukaan laut, sehingga mampu menghasilkan oksigen (O<sub>2</sub>) sebagai kebutuhan utama manusia; dan
13. Memicu inovasi dan kehadiran teknologi yang tepat agar diperoleh sumber “energi alternatif” (Saksono, 2013).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Peneliti melakukan kajian terkait desa wisata berbasis blue ekonomi. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan data skunder yang berasal dari artikel yang relevan.



## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Village Fund Allocation (VFA)**

Anggaran desa merupakan alokasi anggaran yang diterima oleh setiap desa sesuai dengan Permendagri No.37 Tahun 2007 Pasal 22. Alokasi anggaran di setiap desa dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan arah pengembangan desa. Setiap desa berkembang sesuai dengan karakter masing-masing desa. Alokasi anggaran desa perlu dilakukan dengan baik, karena akan mencerminkan desa dalam beberapa tahun kedepan. Perencanaan anggaran yang baik merupakan langkah awal untuk peningkatan kualitas kinerja aparatur desa.

Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam menjalankan aktifitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (Sumenge, 2013). Ketika para manajer sektor publik merencanakan dan menyusun anggaran maka mereka akan menetapkan target/tujuan anggaran yang mudah sehingga dia tidak perlu bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut bahkan untuk melampauainya sehingga akan mengurangi tingkat ketepatan anggaran pada tahap pelaksanaannya (Saputro, 2016).

### **Blue Economy Product (BEP)**

Blue Economy mengoptimalkan sumber daya perairan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin keberlanjutan usaha dan kelestarian lingkungan (Latupapua dkk, 2022). Indonesia mengusulkan prinsip-prinsip pembangunan kelautan dan industri perikanan berdasarkan konsep ekonomi biru untuk merumuskan ekonomi dan lingkungan yang komprehensif, kebijakan perlindungan dilakukan untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan mempromosikan produksi bersih, serta sistem yang mendorong investasi kreatif dan inovatif. Pengembangan perikanan laut, transportasi laut, pariwisata, industri produksi energi dan material dilakukan sebagai dasar konsep pengembangan ekonomi biru, dimana lebih meningkatkan dan mengkoordinasikan kelautan.

Substansi ekonomi biru terletak pada manajemen yang berkesinam. Elemen-elemen dalam ekonomi biru masih menjadi bahan perbincangan di berbagai negara, namun pendekatan yang mungkin dilakukan untuk mencapainya manakala seluruh stake holder memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelolaannya didasarkan prinsip efisiensi alam (nature's efficiency), yakni setiap pengelola sumberdaya alam akan terjadi proses "tanpa limbah" dan tidak ada sisa untuk limbah dimana limbah dari satu proses menjadi bahan baku dari proses produksi lainnya.
- b. Kepedulian sosial dimana akan terjadi peningkatan pendapatan, lebih banyak menghasilkan, lebih banyak menyerap tenaga kerja, dan lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat.

- c. Inovasi dan kreativitas, dimana akan melahirkan bisnis inovatif dan kreatif untuk melipat-gandakan hasil, memperluas lapangan kerja, namun tidak merusak lingkungan. bungan dan melestarikan berbagai jenis sumber daya alam khususnya sumber daya kelautan (Ervianto, 2018).

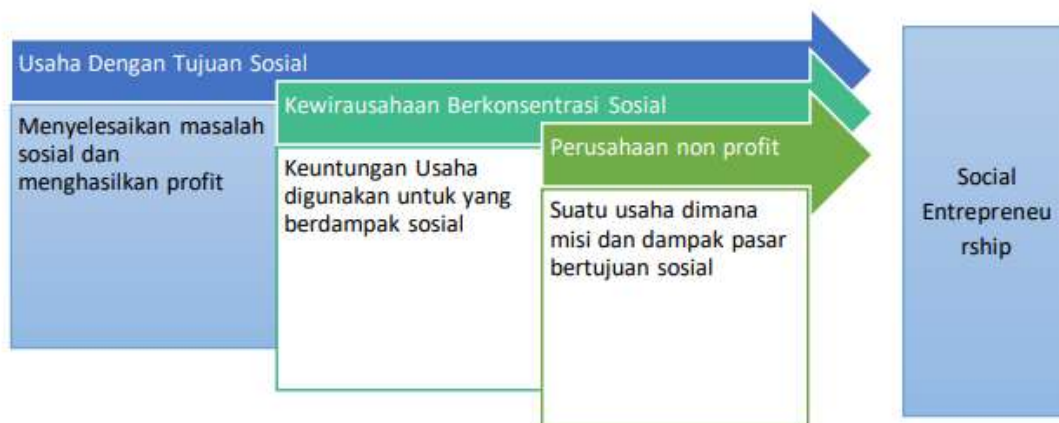
Adapun strategi yang digunakan dalam pemilahan produk unggulan yang dapat dikembangkan oleh ibu-ibu rumah tangga didasarkan pada tiga prinsip ekonomi biru antara lain;

1. Start what we have,
2. Create more value,
3. Create more job.

Tiga prinsip tersebut dalam diimplementasikan pada pemanfaatan limbah sisa makanan dan plastik yang ditampung pada bank sampah Pratama Putra Bojonggede (Rini dkk, 2022). Setiap desa yang terletak di pesisir pantai diharapkan mampu menciptakan dan mengembangkan produk dari ekonomi biru. Produk ekonomi biru (BEP) diharapkan menjadi elemen penting yang dapat dianggarkan dalam anggaran desa, sehingga pengelolaan lingkungan yang bersumber dari ekonomi biru dapat dipraktekan dengan baik.

### Social Preneur Village (SPV)

Sosial entrepreneur merupakan agen sosial yang membantu masyarakat secara ikhlas, jujur, bertanggungjawab dan berdedikasi tinggi untuk kemajuan bangsa dan tidak profit oriented melainkan profit sharing yang nantinya akan berdampak baik bagi masyarakat itu kembali.. Pengembangan wirausaha sosial dalam suatu desa penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan pengembangan UMKM desa dapat berjalan apabila dilakukan secara kelompok.



**Gambar 3. Fokus Social Entrepreneurship**

Kedepan, ide perencanaan desa dilakukan untuk meningkatkan keberlanjutan operasinya dengan memanfaatkan lebih banyak sumber daya lokal baik secara finansial mendukung organisasi maupun menyediakan sumber daya dan konsultasi langsung kepada pengusaha lokal. Desa Berencana diyakini bahwa membangun wirausaha lokal yang dinamis,

harus didukung oleh penduduk setempat, yang percaya akan kota mereka dan pentingnya kewirausahaan (Mautner, 2011).

### **Village Tech (VT)**

Sistem informasi dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang terintegrasi secara optimal dan berbasis komputer yang dapat menghimpun dan menyajikan berbagai jenis data yang akurat untuk berbagai macam kebutuhan. Sistem informasi juga dapat diakses secara realtime oleh seluruh pengguna smart phone dan komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet yang memudahkan publik dalam memperoleh data dan informasi secara detail dan langsung, tidak terkecuali pelayanan informasi desa (Febriantoro & Suaidah, 2021). Pengembangan SID ini diharapkan mampu memberikan inovasi bagi kantor pemerintahan desa khususnya desa bantaran selatan kabupaten hulu sungai selatan provinsi Kalimantan selatan sehingga mampu meningkatkan kinerja perangkat desa ditinjau dari segi kualitas pelayanan terhadap masyarakat, produktivitas, responsivitas, tanggung jawab dan produktifitas (Fitri dkk, 2017).

Pengembangan sistem informasi desa sebagai suatu sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah Desa harus selaras dengan perkembangan sarana dan kapasitas pemerintah desa, dan dipergunakan desa untuk perencanaan desa, melaksanakan akuntabilitas, transparansi dan menyelenggarakan pelayanan publik. sistem informasi desa yang dikelola desa harus dapat memenuhi kebutuhan pihak supra desa untuk memonitor dan mengevaluasi keadaan dan perkembangan desa. Kepentingan utama desa sendiri akan tata kelola data dan informasi adalah untuk memudahkan pekerjaan perangkat desa dan memudahkan warga dalam mengakses informasi (Mukhsin, 2020). Dengan tujuan seperti diuraikan di atas, informasi dan data kritis yang perlu tersedia dalam sistem informasi desa meliputi beragam isu, diantaranya:

1. Kependudukan; Keadaan dan perubahan daftar penduduk desa, pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, tingkat pendidikan, kepemilikan identitas hukum, dan pekerjaan.
2. Pendidikan; Kondisi khusus pendidikan anak-anak usia sekolah, termasuk status bersekolah, tidak bersekolah, dan putus sekolah yang dipilah berdasarkan gender.
3. Kesehatan; Data dan informasi wabah, penyakit endemik, data ibu hamil dan kepatuhan pemeriksaan kehamilan/prenatal/postnatal, data anak balita dan status gizi, angka kematian ibu dan bayi. Juga termasuk informasi mengenai fasilitas dan tenaga kesehatan tingkat desa. Kondisi sarana dan prasarana dasar Perumahan, air bersih, dan sanitasi; menggambarkan keadaan perumahan menurut kelayakan kesehatan lingkungan, termasuk akses air bersih dan fasilitas sanitasi.
4. Kemiskinan dan kerentanan; Identifikasi rumah tangga berdasarkan status sosial ekonomi, khususnya rumah tangga miskin dan rentan, termasuk yang dikepalai oleh perempuan dan/atau disabilitas, penerima program perlindungan sosial.
5. Pembangunan Perencanaan; data rencana pembangunan jangka menengah, rencana tahunan, hasil kegiatan-kegiatan pembangunan, dan inventaris proyek.
6. Keuangan desa; Data anggaran desa, penggunaan anggaran, dan penyertaan modal oleh desa, Aset desa, Daftar aset dan perubahan aset desa, keadaannya, status penguasaan, baik merupakan sarana prasarana fisik maupun nonfisik (misalnya penyertaan modal)

7. Organisasi kemasyarakatan; Menggambarkan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di desa dan kegiatankegiatannya.
8. Kegiatan ekonomi masyarakat; Menggambarkan jenis-jenis pekerjaan masyarakat, kegiatan pertanian, industri, perdagangan, termasuk kepemilikan lahan.
9. Informasi kawasan perdesaan; Sarana prasarana kawasan, tata guna lahan, dan lingkungan.

Pembangunan pedesaan berbasis internet ini dilakukan melalui proses yang direncanakan secara bertahap. Diawali dengan pengembangan membangun website desa-desa dengan domain desa.id, migrasi ke teknologi open source, pengembangan aplikasi mitra desa, pengembangan aplikasi lumbung desa, hingga membangun interkoneksi desa-desa yang mendukung pengambilan inisiatif pembangunan (Badri, 2016).

## **KESIMPULAN**

Peningkatan kualitas desa tidak hanya dapat dilakukan hanya dengan bertumpu pada dana desa. Pemerintah desa harus dapat menggunakan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan di desa. Desa wisata sebagai gambaran bahwa masyarakat telah ikut aktif dan peduli akan lingkungan desa. Kualitas dalam membangun desa wisata juga harus melihat nilai-nilai yang dibangun seperti cara pengolahan yang tidak menimbulkan polusi dan pencemaran, pengemasan produk dengan bahan ramah lingkungan, pemanfaatan serta pengelolaan sampah yang baik dan benar. Praktek wisata berbasis blue ekonomi mengangkat isu dan permasalahan desa terkait sektor kelautan, issue ini juga menjadi nilai jual bagi desa untuk menunjukkan bahwa masyarakat desa mampu untuk bergotong royong membangun ekonomi desa dengan menciptakan produk ekonomi biru. Anggaran berbasis produk untuk mendukung desa wisata ini dapat dilakukan dengan system Product Base Budget System (PBBS). Dimana desa wisata yang tetap exsis dan berkembang harus mengadopsi: (1) Village Fund Allocation (VFA): adanya kepedulian pemerintah dalam mengalokasikan anggaran berbasis blue budget dalam sektor pengadaan dan pemeliharaan ekosistem laut. (2) Blue Economy Product (BEP): masyarakat mampu menciptakan produk ekonomi biru yang mendukung pariwisata, sehingga munculnya banyak pengusaha baru. (3) Social Preneur Village (SPV): membangun kelompok usaha masyarakat dan kerjasama sosial baik dalam bentuk permodalan, pengembangan ZIS (zakat, infaq, sadaqah). (4) Village Tech (VT): membangun teknologi informasi desa, baik dalam bentuk web desa maupun aplikasi yang memudahkan masyarakat atau wisatawan untuk mengetahui spot wisata dan kultur desa.

## REFERENSI

- Asni, F dkk. (2013). The Management of the Village Fund Allocation as an Instrument Towards Economic Independence Village (Case Studies in 2 Villages in Siak Regency, Province Riau). *Journal of Business and Management*, 10(4), 01-09.
- Astawa, P., Triyuni, N. N. & Santosa, I.D.M. (2017). Sustainable Tourism and Harmanious Culture: a Case Study of Cultic Model at Villafe Tourism. *Journal of Physics*, 1-9. doi:10.1088/1742-6596/953/1/012057.
- Badri, M. (2016). Pembangunan pedesaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (studi pada gerakan desa membangun). *Jurnal Dakwah Risalah*, 27(2), 62-73.
- bps.go.id diakses 23 Januari 2022.
- Ervianto, W. I. (2018). Studi Pendekatan Ekonomi Biru Untuk Infrastruktur Di Indonesia. *Prosiding Semnastek*.
- Febriantoro, D., & Suaidah, S. (2021). Perancangan Sistem Informasi Desa pada Kecamatan Sendang Agung Menggunakan Extreme Programming. *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 2(2), 230-238.
- Fitri, R., Asyikin, A. N., & Nugroho, A. S. B. (2017). Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Menuju Tata Kelola Desa Yang Baik (Good Governance) Berbasis Tik. *POSITIF: Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi*, 3(2), 99-105.
- Ghalidza, N. M. B. (2020). Konsep Blue Economy terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(1), 27-31.
- Hakim, M. F. (2013). Blue economy daerah pesisir berbasis kelautan dan perikanan. *Economics Development Analysis Journal*, 2(2), 1-7.
- Handayani, A. P. & Badrudin, R. (2019). Evaluation of Village Fund Allocation on Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 20(3), 283-295.
- Latupapua, C. V., Hiariey, H., Atamimi, R., Latuihamallo, J., & Latuconsina, Z. (2022). Edukasi Masyarakat Negeri Sawai; Optimalisasi Potensi Usaha di Desa Wisata Berbasis Ekonomi Biru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 13-19.
- Mautner, H. (2011). it takes a village. *Economic Development Journal*, 10(4), 37.
- Mukhsin, M. (2020). Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi Menerapkan Sistem Informasi Desa dalam Publikasi Informasi Desa di Era Globalisasi. *Teknokom*, 3(1), 7-15.
- Mursyidin dkk. (2019). The Effectiveness of Village Budget Used for Village's Development. *Opcion*, 35(19), 1158-1174).

- Nurwati N. (2008). Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjajaran*, 1(10), 1-11.
- Pimpalkhute, P.U. (2021). Carbon Budget Tagging (CBT) Is Carbon Budget as Evaluation Framework the Solution?, *Eco Endeavourers Network*.
- Purnomo, S., Rahayu, E. & Riani, L. (2020). Empowerment Model for Sustainable Tourism Village in an Emerging Country. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(2), 261-270. oi:10.13106/jafeb.2020.vol7.no2.261.9.
- Rini, A. D., Burhan, S. Y., Agusalm, L., Panjaitan, M., Purwandaya, B., Abdullah, Z., & Pasaribu, B. (2022). Pemberdayaan Kaum Perempuan dalam Pengembangan Model Bisnis Berbasis Ekonomi Biru. *Jurnal KARINOV*, 5(1), 70-74.
- Saksono, H. (2013). Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Bina Praja*, 5(1), 1-12.
- Saputro, F., Irianto, B. S., & Herwiyanti, E. (2016). Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Anggaran Sektor Publik. *SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business*, 1(2), 21-39.
- Sumenge, A. S. (2013). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Suprihardjo, R. D. (2014). Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamengkasan. *Jurnal Teknik Pomits*, 3(2), c245-c249.
- Susilowati S. H., (2010). Pendekatan Skala Ekuivalensi untuk Mengukur Kemiskinan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 2(28), 91-105.
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Warsono, H., & Ruksamin, D. (2014). The obstacles of implementation of village allocation fund program in the North Konawe Southeast Sulawesi. *J. Mgmt. & Sustainability*, 4, 175.